



PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Oleh:
Dr. Ir. Aryanto Husain, MMP
(Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo)

Dipaparkan pada Rakor Kick Off
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo
Rg. Dulohupa. 5 Februari 2021

PETA PROSES BISNIS

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Adalah **diagram** yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan

PermenPANRB No. 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Keterkaitan - 08

suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.

Fungsi Silang - 07

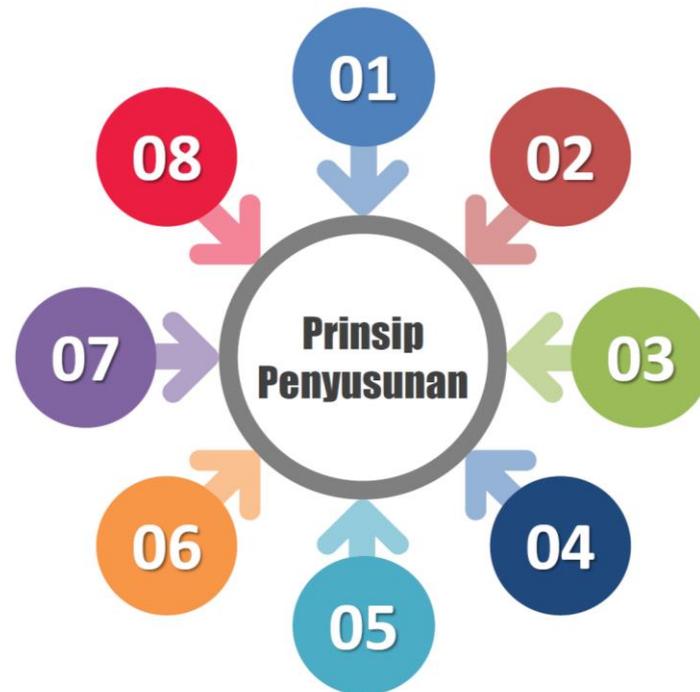
suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.

Sederhana Representatif - 06

mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.

Konsensus subjektif - 05

disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.



01 - Definitif

Peta probis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas

02 - Urutan

Peta probis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.

03 - Pelanggan

pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.

04 - Nilai tambah

transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.



Hasil evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

LATAR BELAKANG PENTINGNYA PETA PROSES BISNIS



- ✓ Kualitas pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan publik.
- ✓ Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan unit lain
- ✓ Ego sektoral, keengganan untuk berkomunikasi, dan berkoordinasi antara satu unit organisasi dengan unit organisasi lainnya.



MANFAAT

Potensi Masalah

mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah



PermenPANRB 19
Tahun 2018

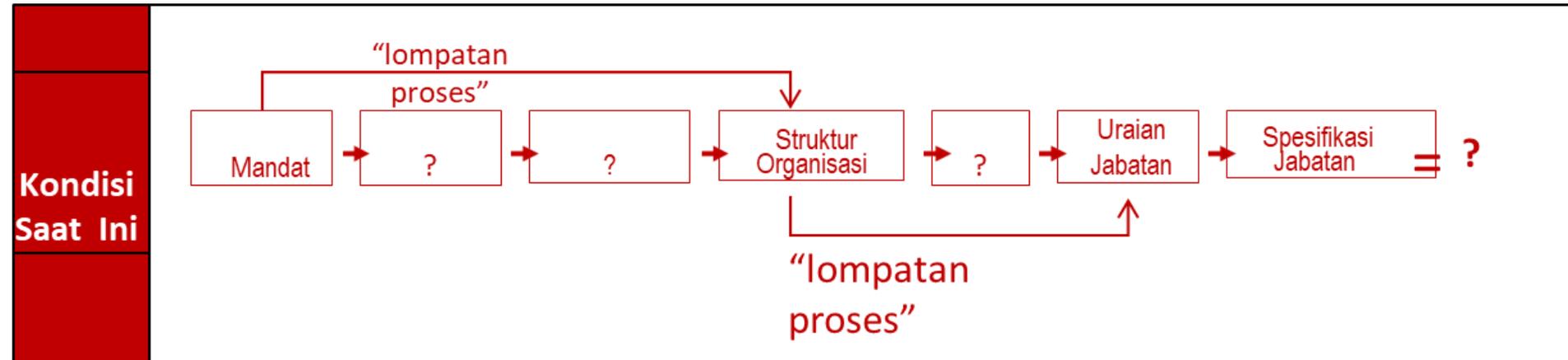


Standar Kerja

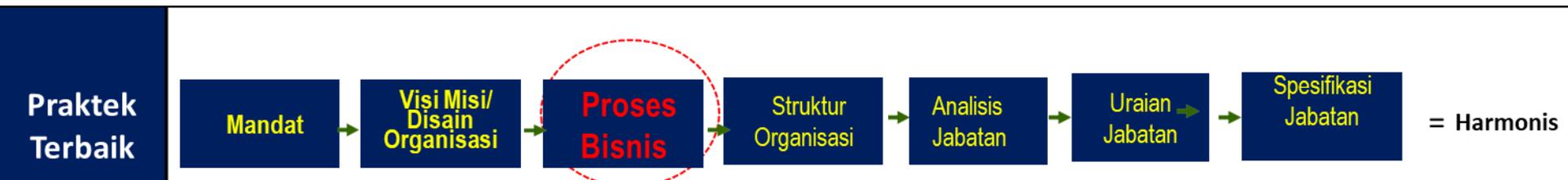
memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan



KESELARASAN DAN KONSISTENSI UNTUK MENJAGA EFEKTIVITAS ORGANISASI



↕ Kesenjangan

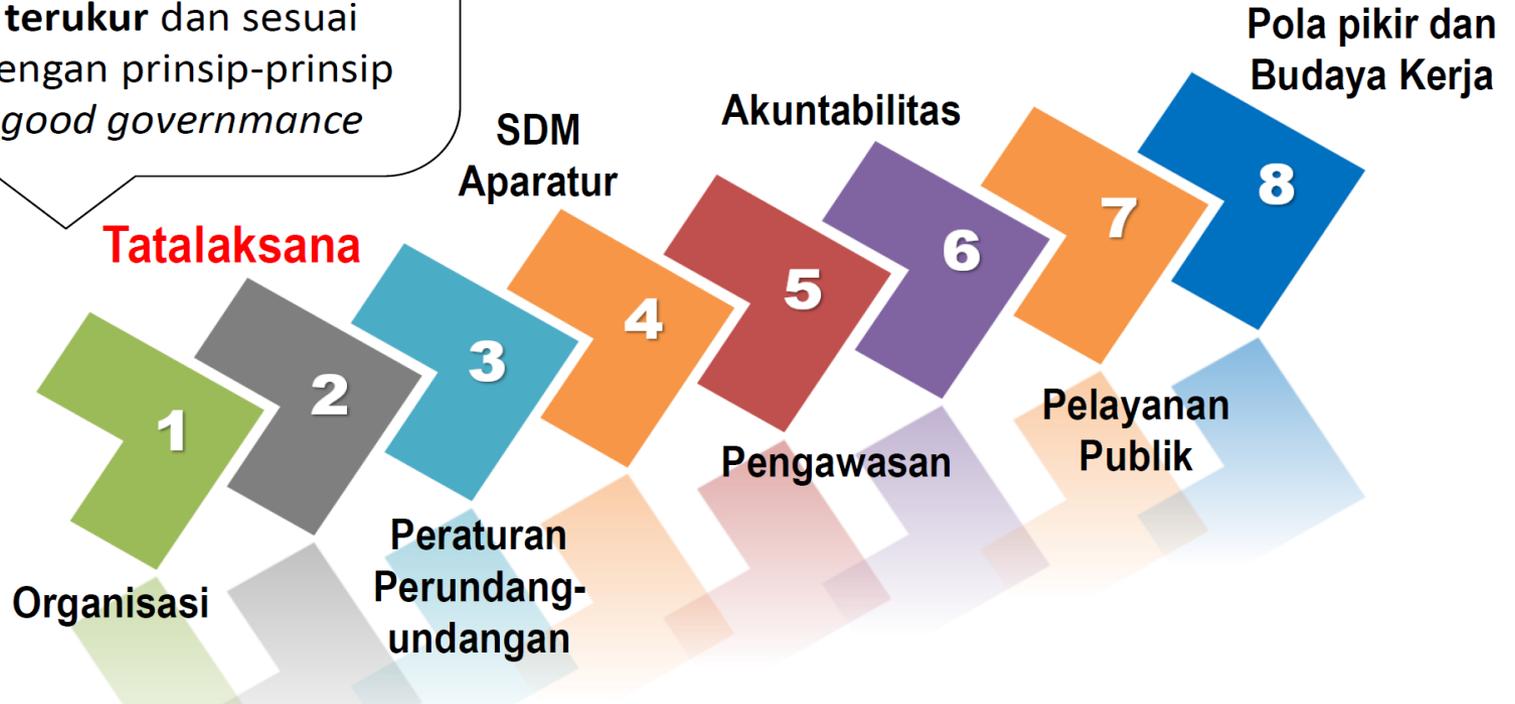


1. Adanya “**lompatan proses**” pada praktek yang dilakukan selama ini;
2. Tanpa melakukan pemetaan visi misi dan bisnis proses terlebih dahulu, cenderung menghasilkan struktur uraian jabatan yang “**regulatory minded dan seragam**”;
3. Uraian jabatan yang “**seragam**” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi implementasi dan capaian indikator kinerja secara spesifik dan terukur;

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Hasil yang diharapkan

sistem, **proses** dan prosedur kerja yang **jelas**, efektif, efisien, **terukur** dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*

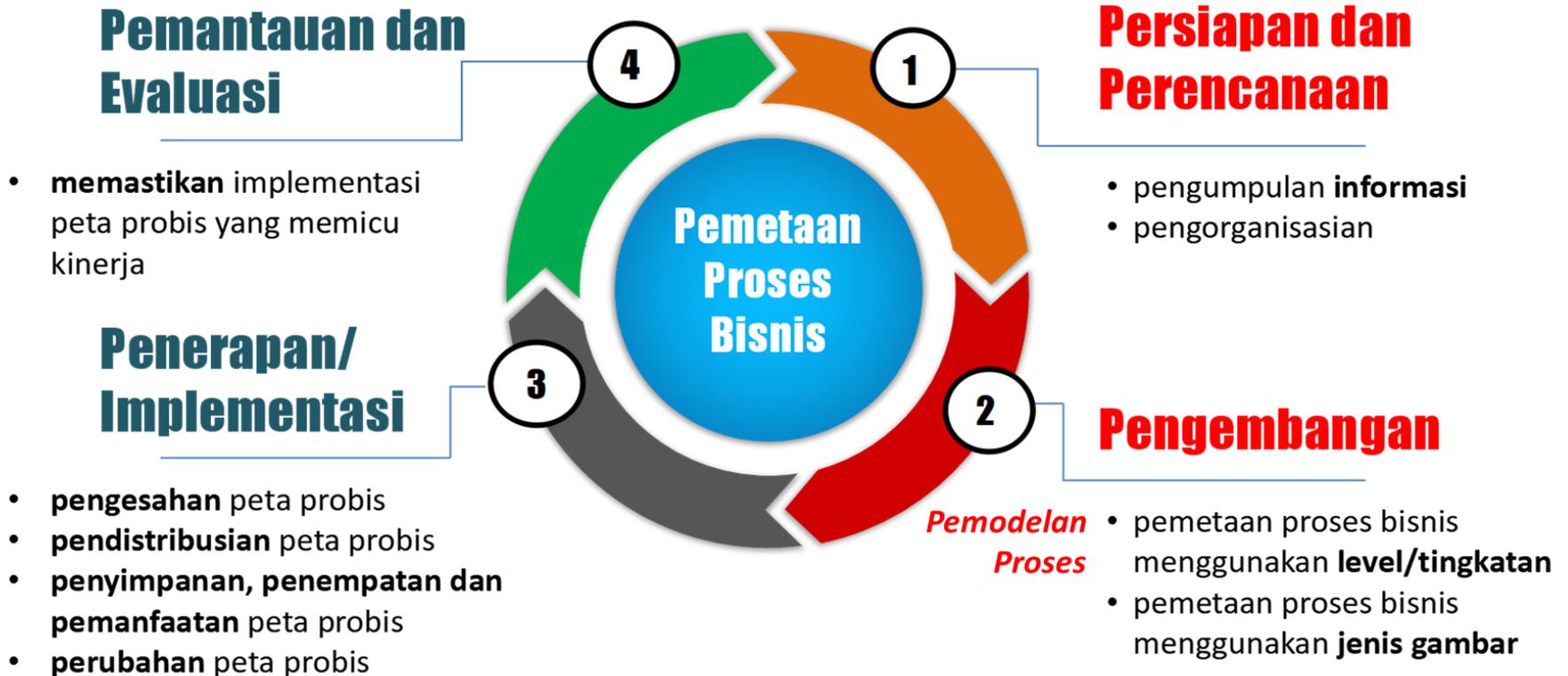


Birokrasi yang tidak efektif, tidak efisien, bertele-tele dan tumang tindih



Birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dengan pelayanan public yang berkualitas

TAHAPAN PENYUSUNAN



A

Tahap Persiapan dan Perencanaan

STEP 1

Tahap Pengumpulan Informasi

- Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer (wawancara) dan informasi sekunder (dokumen renstra, SOTK, peraturan lainnya)

STEP 2

Tahap Pengorganisasian

- Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan instansi pemerintah
- secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana

B

Tahapan Pengembangan

Kerangka peta probis menggunakan Level

BPMN

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.



Level atau tingkatan

beberapa **level atau tingkatan** (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya)

Jenis gambar peta

jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.



Peta Proses Bisnis

FLOWCHART

Kerangka peta probis menggunakan gambar

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi

C Tahap Penerapan

01

Pengesahan

1. Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan; dan
2. pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan.

02

Pendistribusian

1. Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui *hard copy* dan *soft copy*; dan
2. unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai *master file* dari sistem ketatalaksanaan organisasi.

03

Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan

1. Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
2. bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru

04

Perubahan

1. Perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;
2. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
3. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
4. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
5. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

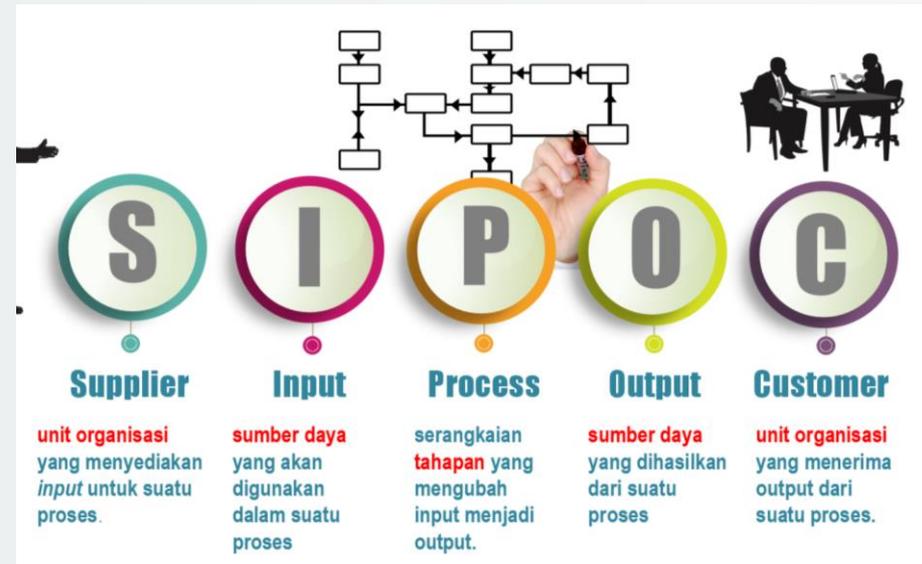
D

Tahap Pemantauan dan Evaluasi

- Peta proses bisnis bersifat dinamis, sehingga perlu dipantau dan dievaluasi relevansi dan efektivitasnya
- Tahapan ini dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali oleh unit kerja yang membidangi urusan tata laksana
- Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan implementasi proses bisnis instansi pemerintah
- Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kementerian PANRB

PENGUMPULAN INFORMASI

- Pengumpulan informasi
 - Primer (melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses)
 - Sekunder (melalui dokumen rencana strategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi)
- Informasi yang dibutuhkan terkait dengan *supplier*, *input*, proses, *output*, dan *customer*.
- **Teknik Analisis:**



Analisis kausal: telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.

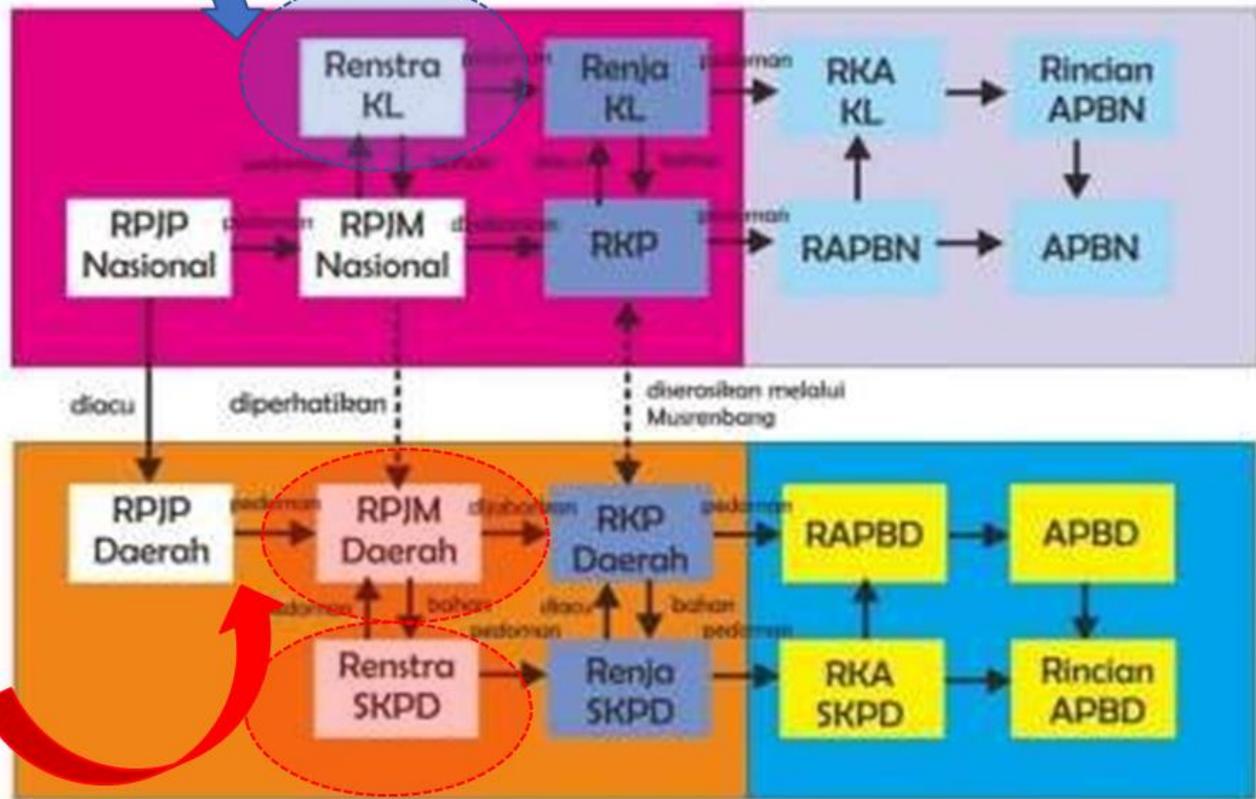
Klasifikasi proses: memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.

Pemodelan proses: pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

IDENTIFIKASI PROSES BISNIS

Acuan
Proses
Bisnis
Pusat

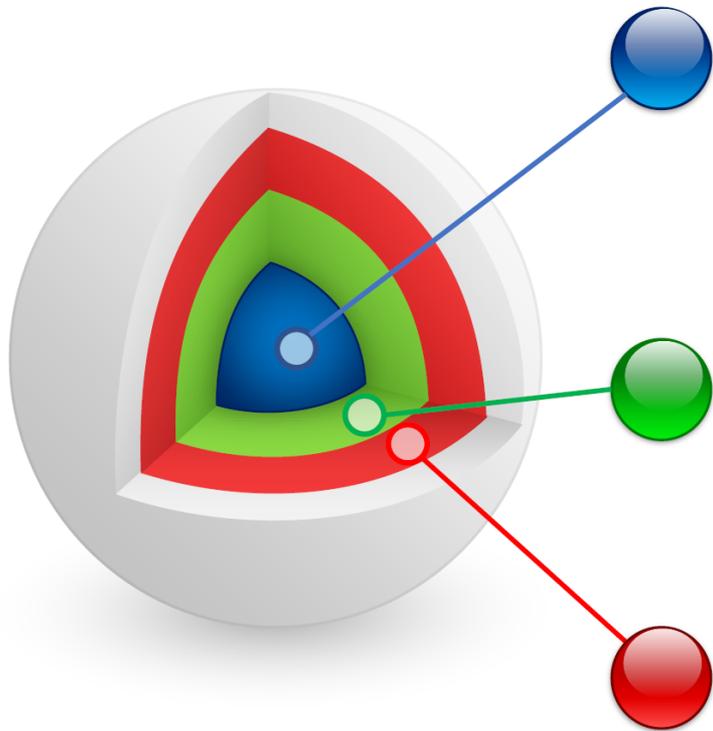
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Acuan
Proses
Bisnis
Daerah

Bahan: Perda tentang Renstra dan Org. Tata Kerja

PENGELOMPOKAN PROSES



PROSES INTI

Proses inti merupakan proses yang menciptakan **aliran nilai utama**

- a. **Berperan langsung** dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah
- b. **Berpengaruh langsung** terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi
- c. Memberikan **respon langsung** terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna

PROSES PENDUKUNG DAN MANAJEMEN

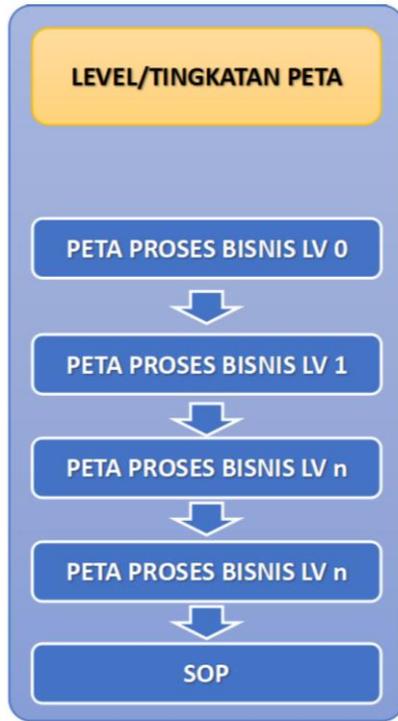
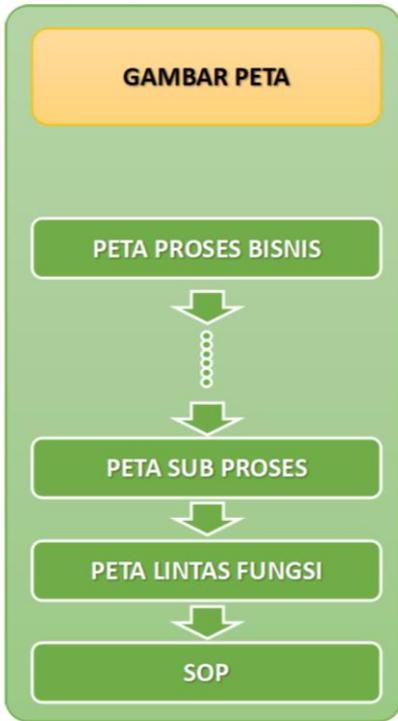
Proses pendukung adalah proses untuk mengelola **operasional** dan **manajemen** dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik.

- a. Memenuhi kebutuhan pengguna internal
- b. Memberikan **dukungan** atas aktivitas pada proses inti

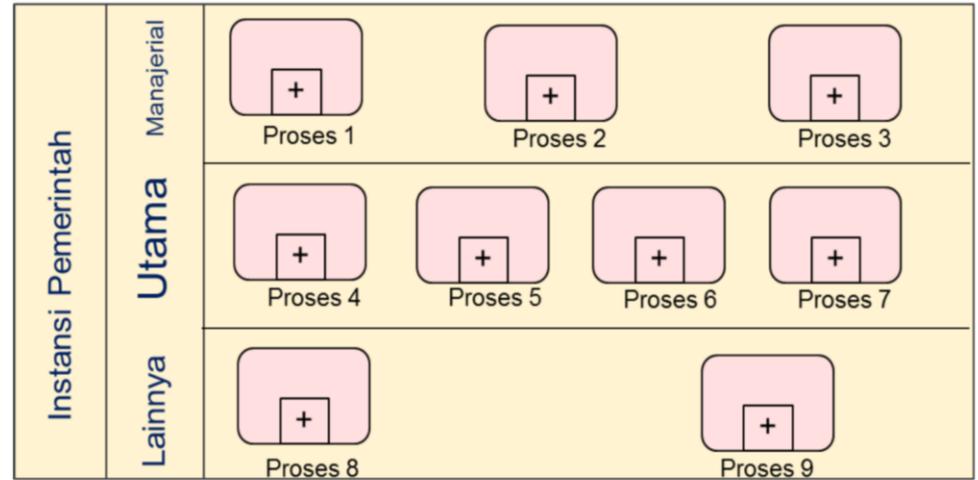
PROSES LAINNYA

Proses lainnya adalah proses yang **tidak memiliki kaitan langsung** dengan proses inti namun menghasilkan **nilai manfaat** bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

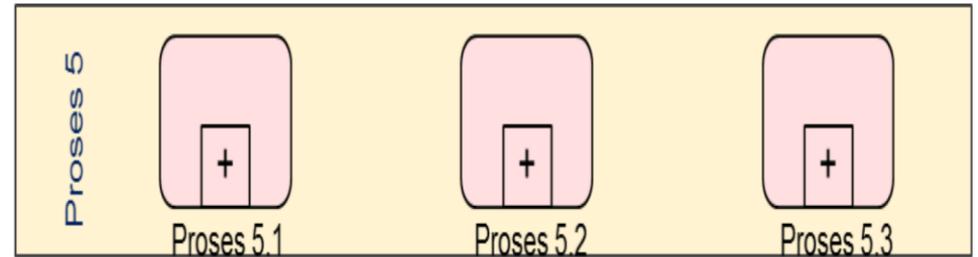
MODEL PROSES



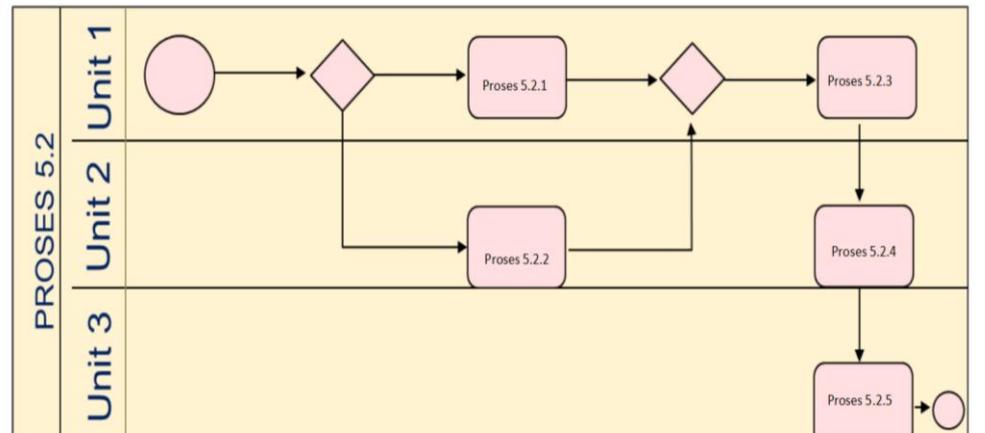
Level 0



Level 1



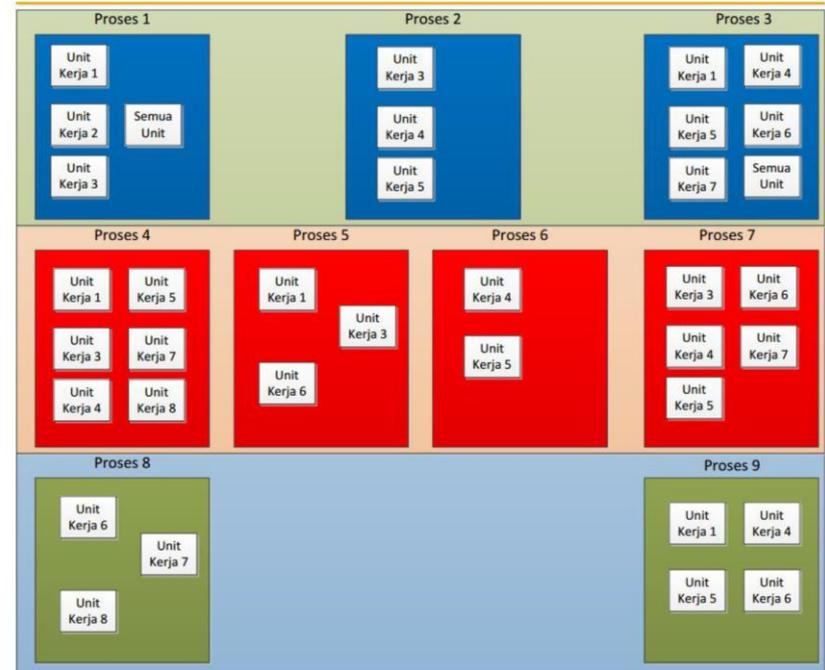
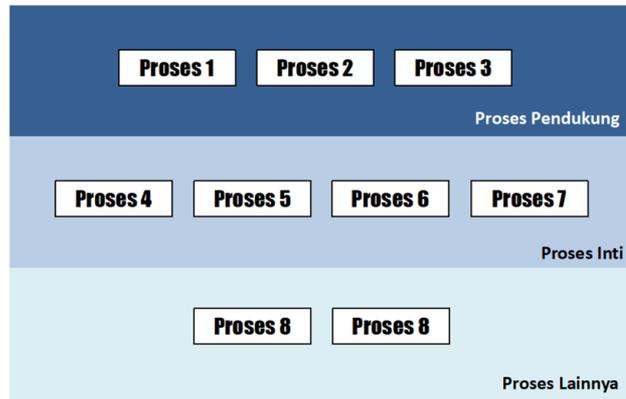
Level 2



JENIS PETA DALAM PROSES BISNIS

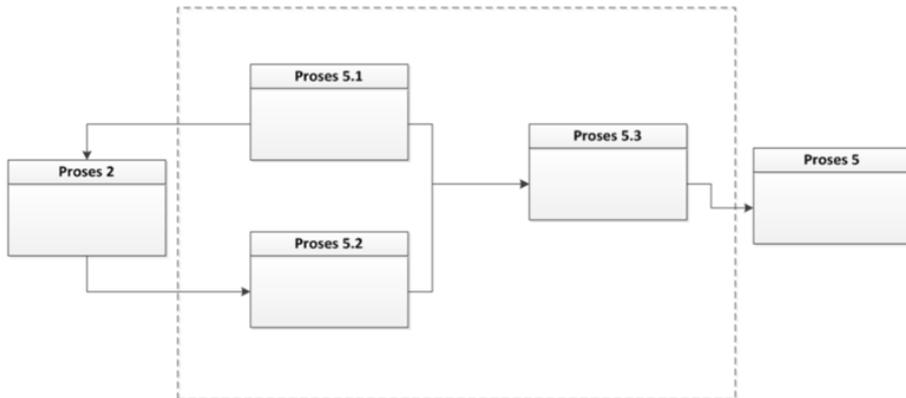
Peta Relasi

Peta Proses

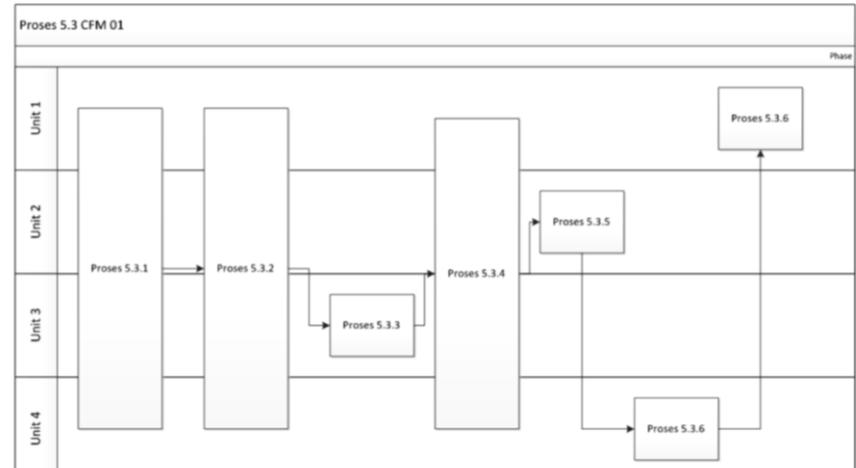


Peta Sub Proses

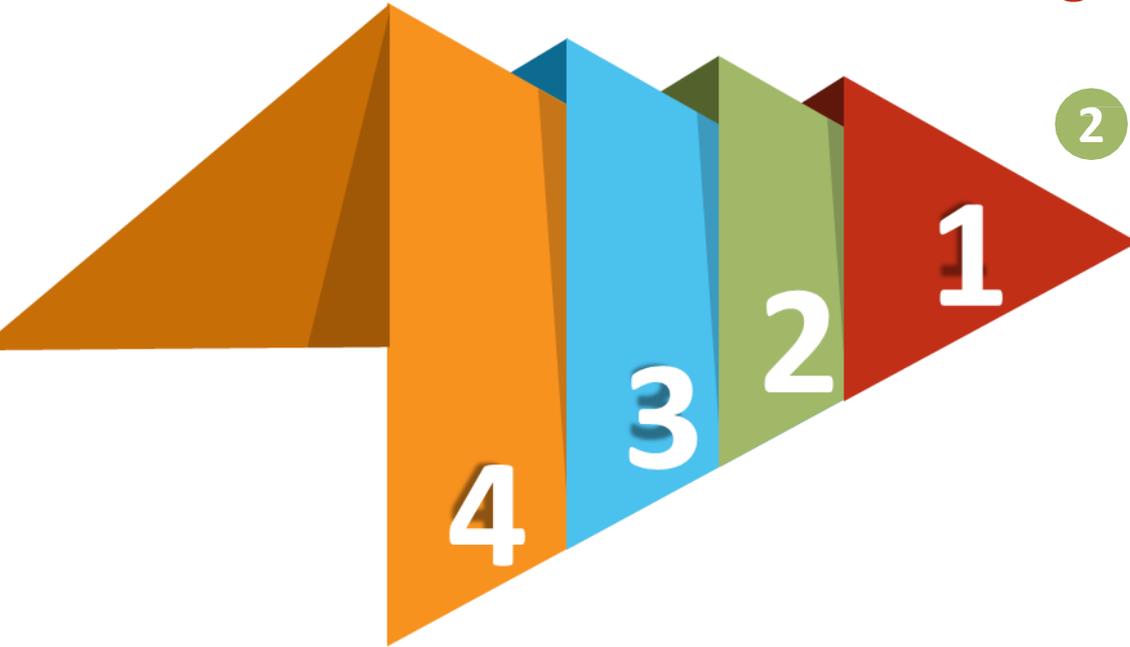
Proses 5



Peta lintas fungsi



LET'S DO IT...



1 Identifiikasi Visi, Misi,
Tujuan Sasaran
Organisasi PD

2 Tentukan dan sepakati:
- Proses Utama
- Proses Pendukung
- Proses lainnya (bila ada)

3 Breakdown masing-
masing proses
menjadi sub proses

4 Buat
(Flowchart):
- Peta relasi
- Peta lintas fungsi
- SOP

Buat BPMN

- Turunkan sub proses
sampai level terkecil

1 Identifikasi Visi, Misi, Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

VISI	Tuliskan Visi IP
MISI	Tuliskan Misi IP
TUJUAN	Sebutkan Tujuan IP
SASARAN	Sebutkan Sasaran IP

2

Tentukan dan sepakati - Proses Utama -Proses Pendukung - Proses lainnya (bila ada)

Sebutkan sasaran

Tentukan dan sepakati **Proses Utama**

Tentukan dan sepakati **Proses Pendukung
(Manajerial)**

Tentukan dan sepakati **Proses Lainnya**

3 Breakdown masing-masing proses menjadi sub proses

PETA PROSES

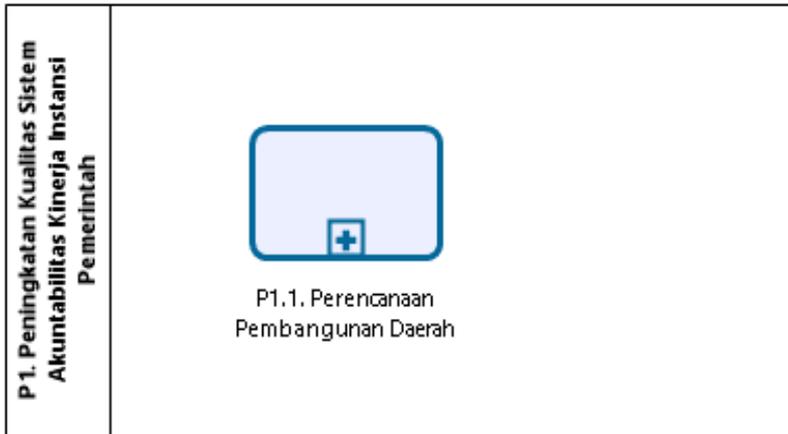
PETA SUB PROSES

BTL 1	Subpro 1.1
	Subpro 1.2
	Subpro 1.3
BTL 2	Subpro 2.1
	Subpro 2.2
BTL 3	Subpro 3.1
	Subpro 3.2
	Subpro 3.3
	Subpro 3.4

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
KEMENPAN-RB
TAHUN 2015-2019

VISI	Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi				
MISI	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan RB2. Menciptakan Pemerintahan yg Efektif & Efisien.3. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif4. Mengembangkan Transparansi & Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan				
TUJUAN	Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas	Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi

Perencanaan Daerah

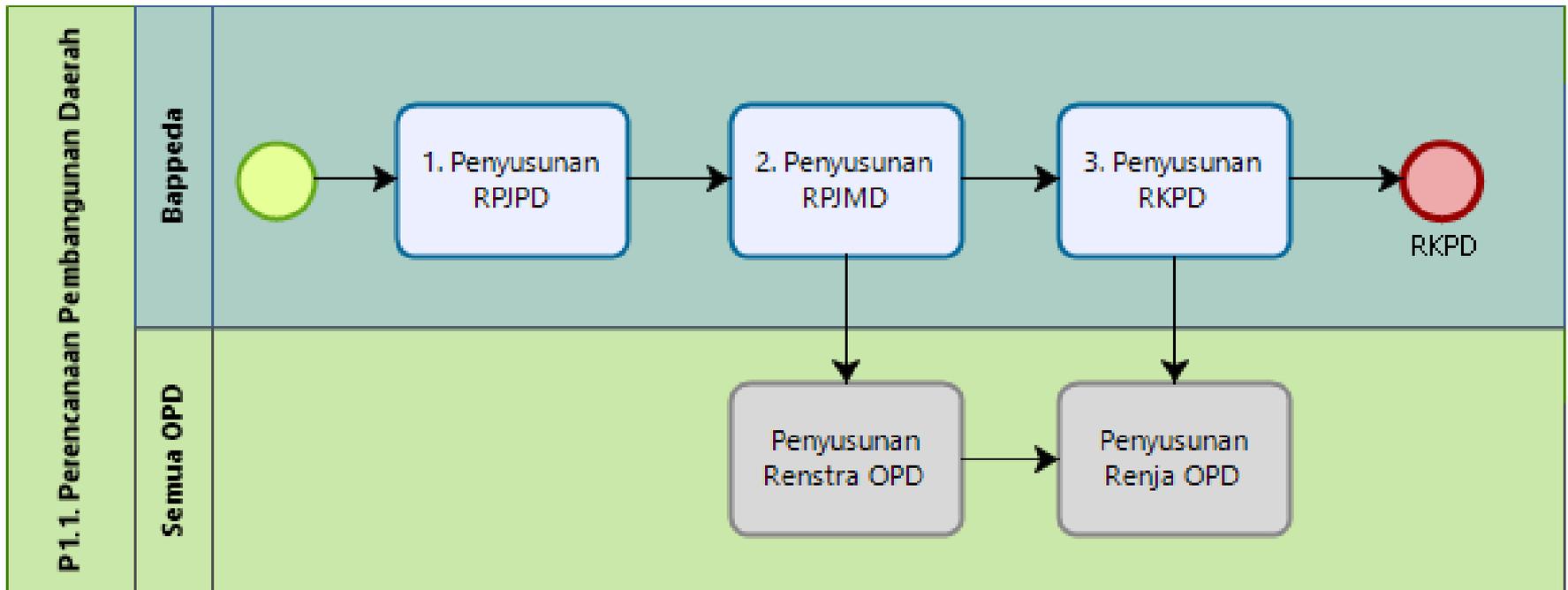


PETA PROSES BISNIS

Perencanaan (Level 1)

PETA LINTAS FUNGSI

Perencanaan Pembangunan Daerah (Level 2)



PETA RELASI BISNIS

Perencanaan

Proses 1 Perencanaan

OPD Pelaksana

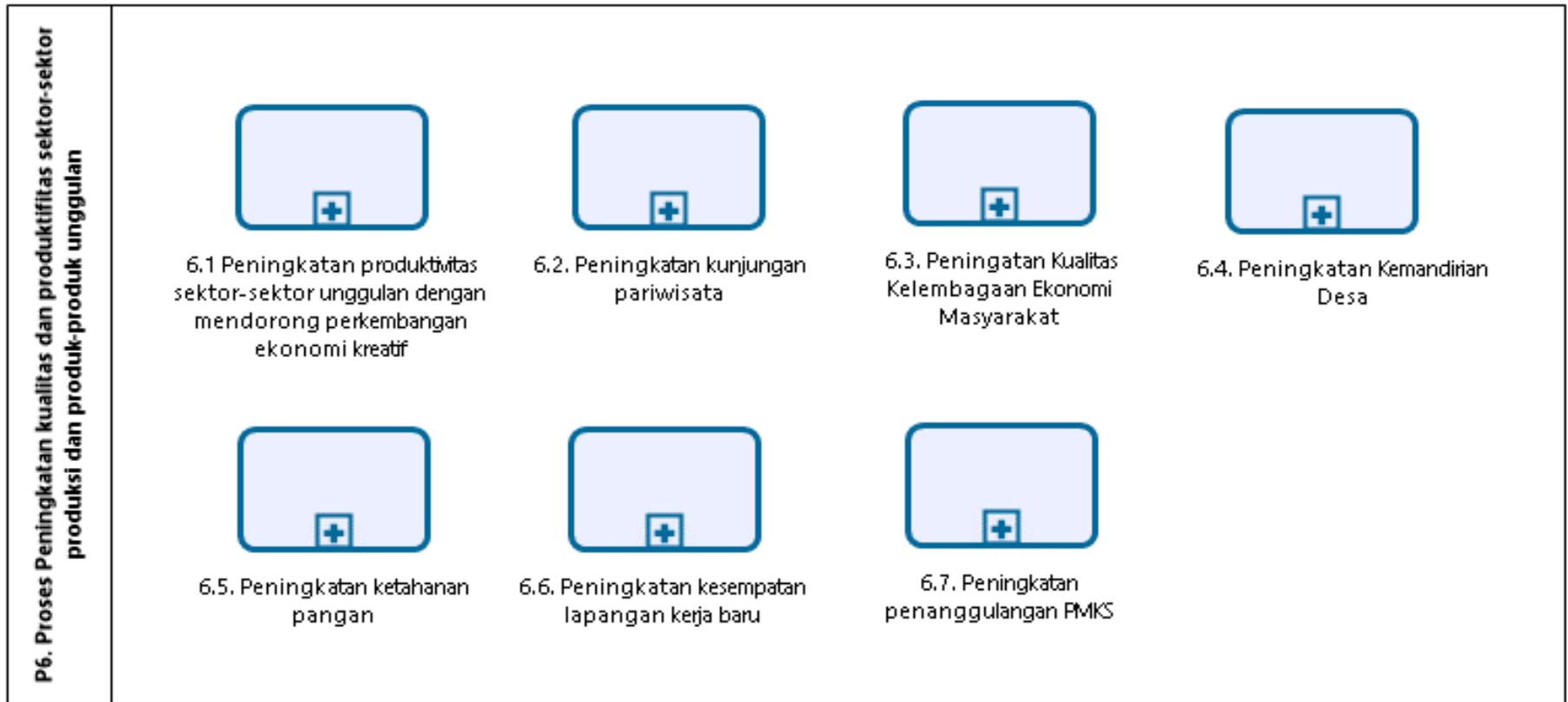
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

OPD Penunjang

Semua OPD

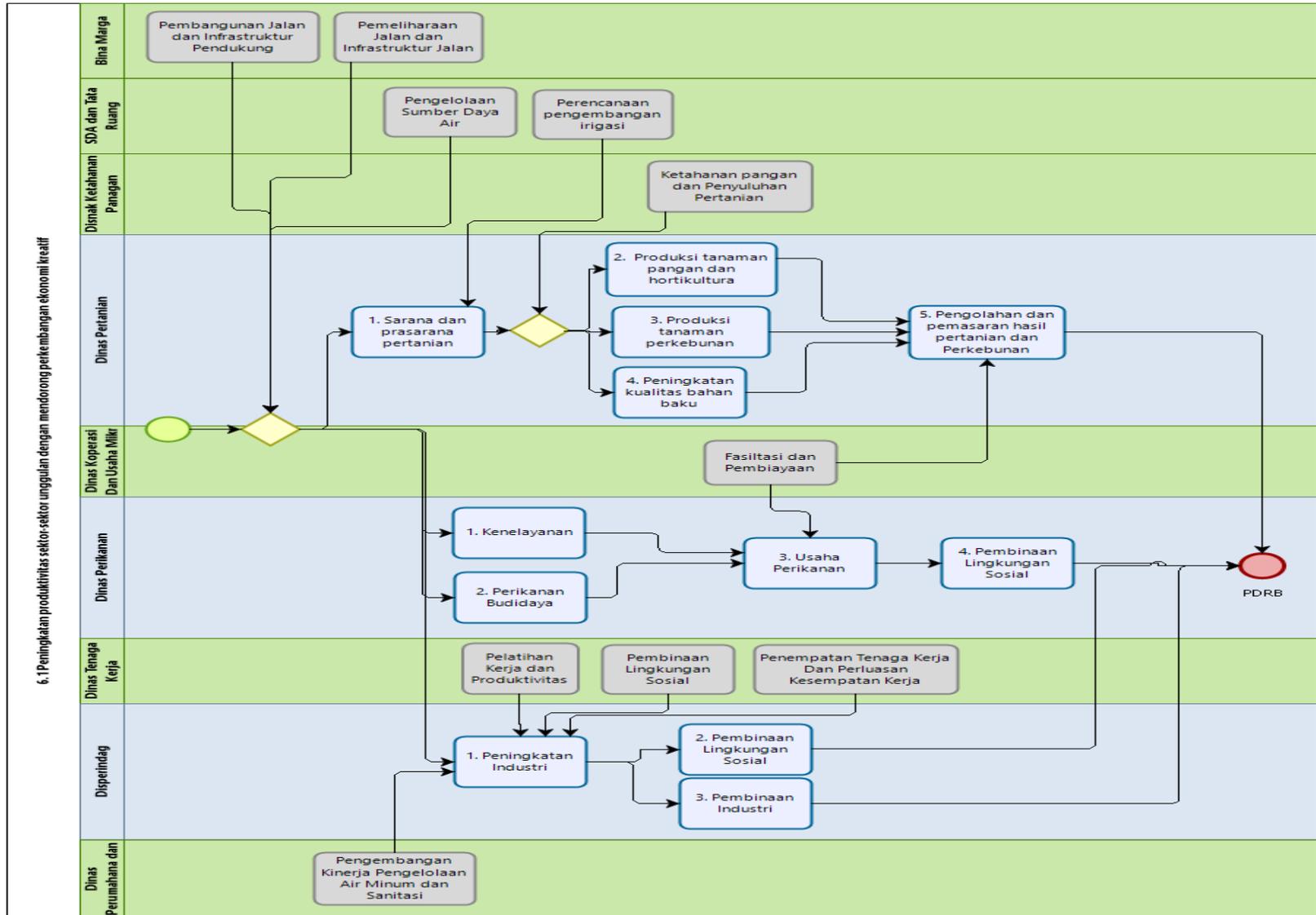
PETA PROSES BISNIS

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi dan Produk-Produk Unggulan



PETA LINTAS FUNGSI

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi dan Produk-Produk Unggulan



PETA RELASI BISNIS

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi dan Produk-Produk Unggulan

Proses 6 Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi Dan Produk-Produk Unggulan				
OPD Pelaksana	Dinas Pertanian	Dinas Perikanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	Dinas Tenaga Kerja
	Dinas Sosial			
OPD Penunjang	Dinas PU Bina Marga	Dinas PU	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
	Satpol PP	Dinas Perhubungan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SETDA (Bagian Perekonomian)	Dinas Sosial	Dinas Pendidikan
	Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	SETDA (Bagian Kesejahteraan)	Dinas Kesehatan & RSUD	

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

Visi

MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA

Misi

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa
2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi Pertanian
3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah
4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata
5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Agama
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah

Tujuan

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
2. Meningkatkan Produktivitas pertanian menuju Banggai Swasembada Pangan berkelanjutan
3. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi maritim untuk mendukung perekonomian daerah
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan local
6. A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
B. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan
c. Mewujudkan "Desa Membangun Banggai".

Level 0

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

Masyarakat

BGI-01
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

BGI-02
Pengembangan
Swasembaga Pangan

BGI-03
Pemberdayaan Potensi
Kemaritiman

BGI-04
Peningkatan dan
Pemerataan Infrastruktur

BGI-05
Peningkatan Penerapan
Nilai-nilai Agama, Kearifan
Lokal dan Budaya

BGI-06
Peningkatan Kualitas SDM

Masyarakat

PROSES UTAMA

Kementerian/
Lembaga

BGI-07
Perencanaan
Pembangunan

BGI-08
Pengelolaan Keuangan
dan asset

BGI-09
Pengelolaan SDM,
organisasi dan tata
laksana

BGI-10
Pengelolaan Manajemen
Pengawasan

BGI-11
Pelayanan Informasi dan
Komunikasi

BGI-12
Layanan Hukum

Kementerian/
Lembaga

PROSES PENDUKUNG

LEVEL 1

BGI-08
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

BGI-08.01

Peningkatan Akuntabilitas
Keuangan

BGI-08.02

Pengelolaan dan Pelaporan
Keuangan dan Aset Daerah

Turunkan ke peta probis level 2

LEVEL 2

BGI-08.01
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan

BGI-08.01CFM 01

Pengelolaan Penganggaran

Turunkan ke
peta probis
level 3

LEVEL 3

BGI-08.01 CFM 01
PENGELOLAAN PENGANGGARAN

BGI-08.01 CFM 01.01

Penyusunan APBD dan
PAPBD

BGI-08.01 CFM 01.02

Peningkatan koordinasi dan
sinkronisasi potensi pendapatan

BGI-08.01 CFM 01.03

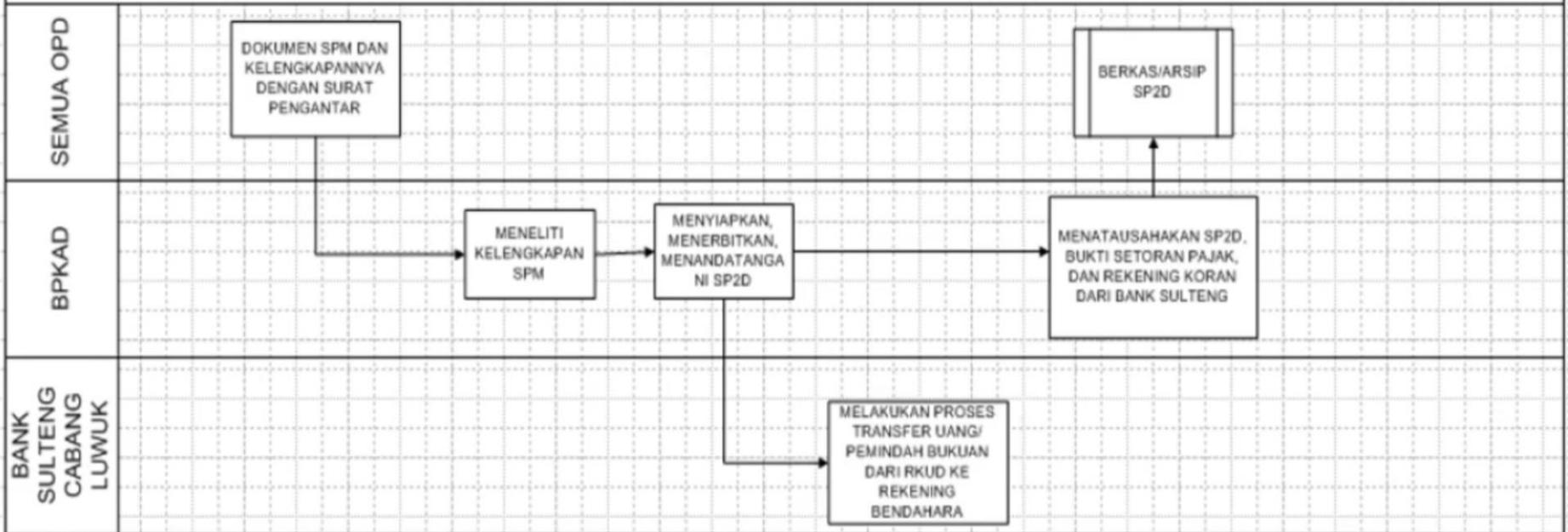
Verifikasi DPA/DPPA

BGI-08.01 CFM 01.04

Penerbitan SPD

Buat SOP dari proses
bisnis level terkecil

BGI.08.01 CFM 01.04 PENATA USAHAAN (PENERBITAN SP2D)



THE WAY FORWARD

- Pembentukan Tim Asistensi, berasal dari unsur terkait
- Asistensi penyusunan dokumen OPD, pendampingan bagi OPD, diskusi dilakukan dengan cara DESK (akan dibagi kemudian)
- Pemeriksaan dan identifikasi dokumen
- Finalisasi dokumen
- Pembuatan PERGUB



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

: a. bahwa untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, perlu peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;



TERIMA KASIH